

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



Social Participation in Community Empowerment through the Development of Alamendah Tourism Village

Partisipasi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Alamendah

Camelina Putri¹, Haura Athahara², Sopyan Resmana Adiarsa³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author: camelinasalehaputri@gmail.com

Article Info

Abstract

Received:

24/08/2024

Revised:

14/03/2025

Accepted

18/05/2025

Keywords:

Participation;
Empowerment;
Development;
Tourism Village

Kata Kunci:

Partisipasi;
Pemberdayaan;
Pengembangan;
Desa Wisata

Abstract: This study aims to analyze the experiences, perceptions, and meanings of community participation in the empowerment of the Alamendah Tourism Village. The research employs a qualitative approach with a phenomenological research design. The relevance of this study to the field of Government Science can be seen from several aspects. First, in designing and implementing the development of a tourism village, knowledge in government science helps local governments and related institutions formulate policies that support community empowerment and effective tourism program management. Second, government science emphasizes the importance of citizen participation in decision-making processes. The data analysis technique used in this study follows Creswell's Phenomenological Analysis, which includes the stages of data management, reading and memoing, describing, classifying, interpreting, and representing or visualizing. Data were collected through observation, interviews, documentation, and audiovisual materials. The results of the study indicate that social participation in community empowerment through the development of Alamendah Tourism Village proceeds through interrelated and complementary stages. The awareness stage successfully fosters community understanding of the importance of their role. The capacity-building stage enhances the skills and knowledge required for managing the tourism village. Finally, the empowerment stage grants autonomy and responsibility to the community, strengthening their independence and active participation.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman, persepsi dan pemaknaan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Desa Wisata Alamendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain metode penelitian fenomenologi. Keterkaitan penelitian ini dengan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam merancang dan melaksanakan pengembangan desa wisata, pengetahuan dalam ilmu pemerintahan dapat membantu pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan program wisata secara efektif. Kedua, ilmu pemerintahan juga mempertimbangkan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Teknik analisis data yang digunakan memakai Phenomenological Analysis dari Creswell yang dalam tahapannya terdapat data managing (pengelolaan data), reading dan memoing, describing, classifying, interpreting, dan Representing, Visualizing. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dokumen dan audiovisual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Alamendah mengikuti tahapan yang efektif dan saling melengkapi. Tahap penyadaran berhasil membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka. Tahap pengkapasitasan memperkuat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan desa wisata. Akhirnya, tahap pendayaan memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada masyarakat, yang memperkuat kemandirian dan partisipasi aktif mereka.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menjadikan pendirian desa wisata sebagai prioritas yang dibuktikan dengan program nasionalnya. Berdasarkan data Jadesta tahun 2024, terdapat total 6033 Desa Wisata di Indonesia yang terbagi dalam empat kategori: Rintisan (4693), Berkembang (994), Maju (315), dan Mandiri (31). Menurut Nuryanti (1993) dalam (Antara & Arida, 2015), Desa wisata merupakan perpaduan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang dihadirkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat adat yang terpadu. Sedangkan menurut (Mumtaz & Karmilah, 2022), Desa wisata adalah wilayah pedesaan dengan potensi wisata adat, budaya, atau alam yang menarik dan dikelola oleh masyarakat agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial penduduk yang tinggal di wilayahnya.

Agro-ekowisata adalah alternatif wisata perdesaan yang memadukan pertanian, alam, budaya, pendidikan, sosial ekonomi sebagai daya tarik utama. Agrowisata merupakan jenis wisata yang menjadikan sumber daya alam sebagai atraksi dengan menambahkan atraksi buatan. Dalam proses pengembangan agroekowisata, masyarakat lokal dan pengambil kebijakan perlu memahami perspektif yang lebih luas mengenai pembangunan pedesaan yang selama ini hanya terbatas pada produk pertanian. (Nabilah & Djuwendah, 2022).

Community-based Tourism (CBT) sedang berkembang di berbagai wilayah, bukan hanya di Indonesia. CBT ini memberdayakan masyarakat mengelola atraksi, budaya, dan potensi alam. Konsep sustainable tourism dan CBT saling berdampingan membangun ranah sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, CBT tidak hanya melibatkan kerjasama antara pelaku usaha pariwisata dan wisatawan, tetapi juga melibatkan peran masyarakat lokal dalam berbagai bentuk kontribusi dalam pengembangannya. Tujuan akhir dari CBT adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan (Nirwani et al., 2023).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang berpotensi menjadi pusat pariwisata. Berdasarkan data statistik Jawa Barat tahun 2019, Kabupaten Bandung memiliki 48 tempat wisata alam, menduduki peringkat 11 Potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) berdasarkan jenisnya. Desa wisata Alamendah yang terletak di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan destinasi wisata yang layak untuk dikembangkan.

Awal mula terbentuknya Desa Wisata Alamendah akibat penunjukan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung karena adanya kegiatan agrowisata seperti kegiatan memetik strawberry yang menarik perhatian wisatawan. Pada awal tahun pertama berdirinya Desa Wisata Alamendah hanya menerima sedikit kunjungan wisatawan karena tidak memiliki produk dan paket wisata yang cukup untuk menarik wisatawan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Alamendah, tim pengelola DWA mulai fokus mengembangkan produk dan paket wisata inovatif pada awal tahun 2019. Paket kegiatan yang ditawarkan antara lain bertani, membuat makanan dan oleh-oleh untuk UMKM, berlatih Pencak Silat, menonton pertunjukan seni karinding, memerah susu sapi, belajar membuat kopi dan bersepeda keliling desa. Semua usaha itu membuahkan hasil. Pada akhirnya, setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh tim pengelola Desa Wisata Alamendah, Desa Alamedah ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/kep.71DISBUDPAR/2011 pada tanggal 2 Februari 2011.

Pemberdayaan masyarakat melalui agrowisata di Desa Wisata Alamendah melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kegiatan wisata. Partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk memastikan pengembangan agrowisata berlanjut dan berhasil. Dengan partisipasi masyarakat, program pemberdayaan lebih mudah diterima dan diterapkan, sehingga lebih banyak manfaat yang diperoleh.

Meskipun agrowisata Desa Wisata Alamendah memiliki potensi yang sangat besar, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Namun dari sebagian masyarakat masih memiliki inisiatif untuk mengembangkan desa wisata dengan melihat potensi yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang desa wisata, keterbatasan akses pelatihan dan keterampilan, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Dilihat dari perspektif interpretative, partisipasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui agrowisata pada pengembangan desa wisata menekankan bagaimanamasyarakat berkontribusi dan menginterpretasikan pengalaman mereka dalam konteks pengembangan desa wisata. Di desa wisata, masyarakat aktif terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan. Menurut perspektif interpretative, masyarakat lokal diberdayakan ketika mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pengembangan desa wisata, seperti membuat kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan.

Keterkaitan antara partisipasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dengan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam merancang dan melaksanakan pengembangan desa wisata, pengetahuan dalam ilmu pemerintahan dapat membantu pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan program wisata secara efektif. Kedua, ilmu pemerintahan juga mempertimbangkan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks desa wisata, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program wisata. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara ilmu pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Ilmu pemerintahan dapat membantu dalam merancang, pelaksanaan, dan pengelolaan pengembangan desa wisata yang efektif, yang mampu memberdayakan masyarakat setempat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Konsep Partisipasi Sosial

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan, atau proses dimana sejumlah anggota masyarakat saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan satu sama lain (Hermansyah, 2021). Sedangkan menurut (Hilman & Arifin, 2020) Dari sudut pandang konseptual dan terapan, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kegiatan tertentu. Keterlibatan ini juga mencakup keterlibatan fisik, mental, dan emosional. Kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab bersama. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa partisipasi adalah peran serta aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurut Levasseur (2008) dalam (Wahyudiyono, 2019) Secara umum, kata "partisipasi sosial" mengacu pada keterlibatan seseorang dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial. Gagasan utama partisipasi sosial adalah bahwa partisipasi sosial memerlukan kontak sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menerima sumber daya dari masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan sosial dapat diartikan sebagai berpartisipasi dalam suatu kegiatan dan memiliki hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan antara partisipasi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan akan lebih kuat karena banyaknya kegiatan sosial yang diikuti.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Menurut (Dzikriansyah, 2022), Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat termasuk pendidikan, penghasilan, kepemimpinan, kesadaran/keinginan, dan usia.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau pemberdayaan). Oleh karena itu, gagasan pokok pemberdayaan dikaitkan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok marginal dan rentan, untuk memiliki kekuatan atau kapasitas dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kebebasan, dalam arti tidak hanya mampu menyampaikan pendapat tetapi juga terbebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
2. Akses terhadap sumber-sumber produktif memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhinya (Suharto, 2014 : 57-58).

Sedangkan menurut Sumardjo (2023) dalam Endah (2020, hlm. 137) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan kemampuan seseorang untuk mengakses peluang, kemauan atau motivasi, dan sumber daya masyarakat, sehingga berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mencapai kualitas hidup diri sendiri dan masyarakat yang terlibat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, poin 12 mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kapasitas, persepsi serta pemanfaatan sumber daya manusia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan dukungan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dengan demikian, pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu proses dan upaya yang bertujuan untuk mencapai atau memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat yang lebih lemah sehingga mereka dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan kebutuhannya, potensi permasalahan yang mereka hadapi, serta memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuannya sendiri.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini mencakup kemandirian dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukannya. Ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih jauh apa arti sebenarnya menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan dan berbuat sesuatu yang dianggap tepat untuk mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan tenaga dan kemampuan meliputi kemampuan kognitif, konatif dan psikomotorik, dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian diperlukan dukungan kapasitas berupa sumber daya manusia yang komprehensif dengan kondisi kognitif, berpikir, psikomotorik dan emosional serta sumber daya fisik dan materiil lainnya.

Menurut Sumodinigrat, pemberdayaan tidak berlangsung selamanya, namun hingga masyarakat sasaran bisa mandiri meski jarak jauh tetap dijaga agar tidak terjerumus ke belakang. (Sumodinigrat, 1998). Dalam pandangan ini pemberdayaan merupakan suatu proses pembelajaran yang memerlukan waktu untuk mencapai kemandirian. Namun untuk mencapai kemandirian tersebut perlu terus dijaga semangat, kondisi dan kemampuannya agar tidak mengalami kemunduran. Seperti telah disebutkan sebelumnya, proses pembelajaran pemberdayaan masyarakat akan dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilakukan menurut Ambar antara lain:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku ditujukan pada perilaku sadar dan peduli sehingga merasa perlu memiliki kemampuan sendiri.
2. Tahap transformasi kapasitas berupa pemahaman pengetahuan dan penguasaan keterampilan untuk membuka wawasan mereka dan memberikan keterampilan dasar agar dapat berperan dalam proses pembangunan.
3. Tahap peningkatan kapasitas intelektual berupa penguasaan keterampilan untuk membentuk kemampuan proaktif dan kreatif menuju kemandirian (Sulistiyani & Teguh, 2004).

Proses pemberdayaan masyarakat yang efektif terjadi secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersiap melakukan kegiatan pemberdayaan. Seperti yang dijelaskan Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam (Bahri, 2019), pemberdayaan sebagai sebuah "proses menjadi" bukan sebuah "proses instan". Teori tahapan pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

1. Penyadaran

Pada tahap ini, mendorong masyarakat untuk memahami hak mereka untuk menjadi mampu dan mendorong mereka untuk keluar dari kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, mereka diberikan "pencerahan", yang merupakan kesadaran akan hak untuk melakukan sesuatu. Tahap ini biasanya dilakukan melalui pendampingan. Misalnya, orang-orang yang hidup dalam masyarakat miskin diajarkan bahwa mereka berhak untuk menjadi anggota masyarakat yang berada jika mereka dapat mengatasi kemiskinannya.

Menurut Mardikanto, penyadaran adalah proses menyadarkan masyarakat akan keberadaannya sendiri, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta kondisi lingkungannya, yang mencakup lingkungan fisik dan teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik (Muslim, 2012: 34). Sedangkan Menurut Notoatmodjo ada tiga ukuran kesadaran, diantaranya :

- a. Pengetahuan
- b. Sikap
- c. Perilaku atau tindakan

2. Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan memungkinkan masyarakat kurang mampu memanfaatkan peluang dengan memberikan pelatihan dan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan hidup. Proses ini disebut pengembangan kapasitas atau lebih sederhananya pemberdayaan.

3. Pendayaan

Pemberian kekuasaan, wewenang, kewenangan atau kesempatan merupakan suatu proses pendayaan. Pemberian kekuasaan kepada masyarakat didasarkan pada kualitas atau kecakapan yang dimiliki masyarakat. Jadi, prinsip utama pendayaan adalah proses pemberian kekuasaan atau wewenang dengan cara memberikan keterampilan kepada orang yang menerimanya. Dengan mengaktifkan sistem simpan pinjam, proses pendayaan dapat dimulai. Setelah melalui proses penyadaran dan peningkatan kapasitas, masyarakat masih perlu menyesuaikan kemampuan pengelolaan usahanya.

Konsep Desa Wisata

Desa berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan. Selain itu, desa mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip gotong royong dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan gagasan membangun dari pinggiran atau desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan memberdayakan masyarakat. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa mempunyai hak adat dan hak ulayat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemandirian desa yang berdasarkan hukum. (Wirdayanti et al., 2021).

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya tempat wisata populer. Seperti yang didefinisikan oleh Pariwisata Inti Rakyat dalam Hadiwijoyo (2012: 68) desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana yang mencerminkan keaslian desa ditinjau dari adat istiadat sosial ekonomi, sosial budaya dan kehidupan sehari-hari, memiliki bangunan dan struktur atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik, serta berpotensi mengembangkan berbagai komponen pariwisata seperti tamasya, fasilitas akomodasi dan kebutuhan perjalanan lainnya.

Tujuan desa wisata adalah untuk menjadikan desa sebagai daerah tujuan wisata yang menarik wisatawan dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal dan pasar pariwisata. Pengembangan desa wisata melibatkan pembuatan paket wisata yang menarik dan pemasaran desa wisata yang belum populer, serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat. Terdapat 4 (empat) jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, antara lain :

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam
2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal
3. Desa wisata kreatif
4. Desa wisata berbasis kombinasi

Menurut Muliawan (2008) dalam (Hayat & Zaini, 2018), kriteria desa wisata sebagai berikut :

1. Mempunyai ciri khas sebagai daya tarik wisata, baik dari segi ciri fisik lingkungan pedesaan ataupun kehidupan budaya dan sosial masyarakat.
2. Adanya dukungan dan kemauan untuk mendirikan fasilitas penunjang pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan wisata pedesaan seperti akomodasi, ruang pertukaran masyarakat dengan wisatawan dan tamu atau fasilitas pendukung lainnya..
3. Adanya hubungan dengan konsumen (wisatawan), ditunjukkan melalui wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut.
4. Adanya dukungan, upaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa yang berkaitan dengan pariwisata.

Terdapat 4 kategori pengembangan desa wisata yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri.

1. Rintisan

Pada tahap ini, desa tidak memiliki banyak turis meskipun memiliki banyak potensi. Selain itu, masyarakat belum berkembang, dan sarana dan prasarannya sangat terbatas. Desa wisata ini harus segera "dikembangkan".

2. Berkembang

Pada tahap ini, wisatawan mulai melihat potensi desa dan destinasi dapat diperluas. Sebagian desa wisata di Indonesia yang sudah dikunjungi wisatawan, namun belum dikelola dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat

3. Maju

Pada masa ini, minat masyarakat terhadap pariwisata mulai tumbuh, dana desa dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi pariwisata, dibentuk tim pengelola, dan kawasan tersebut banyak menarik wisatawan.

4. Mandiri

Saat ini, desa wisata telah memiliki sistem pariwisata baru dari daerah, objek wisata yang mendunia, pelayanan publik dan infrastruktur, serta pengelolaan pentahelix (kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, ilmuwan, dan media).

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengevaluasi dan memahami makna orang atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain metode penelitian fenomenologi, yaitu suatu proses penelitian di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman orang-orang tentang suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive

sampling untuk menentukan informan. Purposive sampling digunakan dalam fenomenologi untuk memilih informan yang dapat memberikan wawasan yang paling bermanfaat terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih informan berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dan bermakna bagi tujuan penelitian.

Creswell, (2013) mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap pengalaman manusia menjadikan pengetahuan fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mempelajari banyak subjek melalui keterlibatan langsung dan jangka panjang di dalamnya guna mengembangkan pola dan hubungan-hubungan, makna. Dalam proses ini, peneliti mengutamakan pengalaman pribadinya untuk memahami pengalaman partisipan penelitian. Menurut (Creswell, 2013) dalam studi kualitatif dengan metode fenomenologi terdapat 4 teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dokumen dan audiovisual. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data fenomenologis menurut Creswell. Pertama, Data Managing (pengelolaan data). Kedua, Reading dan Memoing. Ketiga, Describing, Classifying, Interpreting. Keempat, Representing, Visualizing.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam (Bahri, 2019), bahwa ada 3 tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapsitan, dan tahap pendayaan. Sebagai hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual yang dikumpulkan peneliti, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Menyajikan data dan fakta berdasarkan perhitungan, dan pengamatan yang jelas.

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap penyadaran, pengembangan desa wisata Alamendah berhasil meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengembangan desa wisata dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan sosialisasi.

2. Tahap Pengkapsitan

Dalam tahap pengkapsitan, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi fokus utama. Program pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek seperti

manajemen homestay, pelayanan tourguide, pemasaran produk, dan pengelolaan UMKM.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, fokusnya adalah pada pemberian otonomi dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi desa wisata. Masyarakat kini memiliki otonomi lebih dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan desa wisata. Mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan desa wisata, yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan pemberdayaan yang tinggi. Dengan adanya desa wisata, masyarakat telah mampu menciptakan peluang ekonomi baru, seperti homestay dan usaha lokal lainnya. Pemberdayaan ini bukan hanya meningkatkan pendapatan mereka namun memperkuat keterlibatan mereka dalam ekonomi lokal.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Alamendah mengikuti tahapan yang efektif dan saling melengkapi. Tahap penyadaran berhasil membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka. Tahap pengkapasitasan memperkuat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan desa wisata. Akhirnya, tahap pendayaan memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada masyarakat, yang memperkuat kemandirian dan partisipasi aktif mereka.

Partisipasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Alamendah pada tahap Penyadaran. Dalam tahap penyadaran, pengelola desa wisata dan pemerintah desa memiliki peran penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya dan manfaat dari desa wisata sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

Salah satu upaya utama dalam membentuk Desa Wisata Alamendah adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah desa dan pengelola menyadari bahwa untuk menciptakan desa wisata yang berhasil, mereka harus memahami dengan baik apa itu desa wisata dan bagaimana mengelolanya. Pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan masyarakat mulai digalakkan, mencakup berbagai aspek seperti manajemen, pemasaran, dan layanan wisata. Adanya peningkatan SDM bagi pengelola desa wisata adalah pondasi yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata yang sukses dan berkelanjutan.

Pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan desa wisata pada awalnya kurang diminati, seiring berjalannya waktu dengan dampak nyata yang dialami masyarakat saat ini pelatihan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Mad Abdul Rahman selaku masyarakat, bahwa :

“Menurut saya, sosialisasi atau pelatihan bagi masyarakat perlu diperbanyak karena yang dibina oleh desa wisata adalah orang-orang awam yang belum tahu cara menghadapi atau menyambut wisatawan, dan itu menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat”.

Saat ini masyarakat telah memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata setelah merasakan manfaat dari program desa wisata ini. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Alamendah, tahap penyadaran adalah langkah penting yang melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Partisipasi sosial yang aktif pada tahap ini akan meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan solidaritas masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Partisipasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Alamendah pada tahap Pengkapasitasan

Salah satu bentuk utama pengkapasitasan di Desa Wisata Alamendah yang dilakukan oleh pengelola desa wisata adalah melalui pelatihan dan pendidikan. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan desa wisata, seperti:

1. Pelatihan UMKM : Masyarakat diajarkan cara mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkaitan dengan produk lokal, seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan produk pertanian.
2. Pelatihan Homestay : Pelatihan ini mencakup manajemen homestay, tata cara menyambut tamu, kebersihan, dan pelayanan yang baik untuk memastikan kenyamanan wisatawan.
3. Pelatihan Tourguide : Masyarakat diberikan pelatihan menjadi pemandu wisata, termasuk pengetahuan tentang destinasi wisata, sejarah lokal, dan kemampuan berbahasa asing.

Selain itu, pada tahap pengkapasitasan, partisipasi sosial masyarakat sangat ditekankan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi program desa wisata. Contohnya adalah melalui Rencana Kerja (RENJA) tahunan Desa Wisata, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan pelatihan, memberikan masukan, dan turut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.

Hal ini diperjelas dengan pendapat bapak Sutiana selaku masyarakat, bahwa :

“Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan desa wisata seperti dalam RENJA Desa Wisata kita mendiskusikan bersama bagaimana kedepannya terkait desa wisata Alamendah ini”.

Dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam Rencana Kerja Desa Wisata terjadi diskusi yang melibatkan berbagai pihak tentang rencana kedepannya terkait dengan pengembangan desa wisata Alamendah. Diskusi ini mencakup perencanaan strategis dan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan potensi dan manfaat dari desa wisata tersebut. Melalui proses ini, diharapkan dapat dikembangkan berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengkapasitasan, Desa Wisata Alamendah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti universitas, lembaga pelatihan, dan sektor swasta. Kerjasama ini membantu menyediakan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan oleh masyarakat. Contoh kolaborasi adalah dengan universitas yang memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan manajemen pariwisata yaitu Telkom University.

Partisipasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Alamendah pada tahap Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan fase ketiga dalam proses pemberdayaan masyarakat yang fokus pada penguatan partisipasi aktif dan otonomi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan keterampilan yang ada. Pada Desa Wisata Alamendah, tahap ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mampu berinovasi, mandiri, dan berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata (Wrihatnolo dan Riant Nugroho) dalam (Bahri, 2019).

Desa Wisata Alamendah membentuk kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat. Contohnya, kelompok pengelola agrowisata, kelompok pengrajin, kelompok pengelola homestay, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini berfungsi untuk memfasilitasi kerjasama, pembagian tugas, dan penguatan kapasitas secara kolektif. Selain itu masyarakat didorong untuk mengembangkan produk wisata yang inovatif dan berkelanjutan.

Misalnya, pengembangan paket wisata edukasi pertanian, wisata budaya, dan produk lokal yang ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Ijang Iwan selaku pemerintah Desa, bahwa :

“Saat ini masyarakat banyak dilibatkan dalam tahap pengembangan desa wisata mulai dari perencanaan, persiapan, pengelolaan hingga tahap evaluasi. Pihak pemerinath desa sangat terbuka kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata”.

Pernyataan ini mencerminkan transformasi positif dalam partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Desa Wisata berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi baru, memperbaiki kualitas hidup melalui peningkatan infrastruktur dan pelatihan, melestarikan budaya lokal, serta membangun citra positif desa. Dampak dari adanya desa wisata sangat dirasakan masyarakat Desa Alamendah setelah merasakan manfaatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mad Abdul Rahman selaku masyarakat dan pelaku kesenian, bahwa :

“Desa wisata ini tentu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam desa wisata, masyarakat pun ikut berperan dalam kegiatannya karena yang dikembangkan dalam desa wisata yaitu aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari kesenian, berkebun, beternak itu termasuk kegiatan masyarakat yang ada di desa wisata Alamendah. Desa wisata ini cukup membantu kesejahteraan masyarakat bukan hanya dari segi materi, namun juga berdampak positif khususnya saya sebagai pelaku kesenian. Awalnya kesenian di desa Alamendah tidak menonjol atau tidak dilirik oleh banyak orang, namun dengan adanya desa wisata para pengunjung tertarik untuk berlatih kesenian yang ada di desa Alamendah. Maka dari itu, menurut saya dengan hadirnya desa wisata cukup membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Data ini menunjukkan bahwa desa wisata Alamendah memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi materi maupun nonmateri, dengan menghidupkan kembali dan memajukan aspek kehidupan sehari-hari dan kebudayaan lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Pengembangan desa wisata Alamendah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengembangan desa wisata. Melalui berbagai sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat yang awalnya tidak memahami konsep desa wisata kini mulai menyadari manfaatnya. Masyarakat telah memahami bahwa keterlibatan mereka dalam desa wisata tidak hanya penting untuk pengelolaan dan kelangsungan desa wisata, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mereka sendiri. Sosialisasi yang efektif dan komunikasi yang intensif dengan pengelola desa wisata telah menciptakan kesadaran dan dukungan yang diperlukan untuk memajukan desa wisata.

Pelatihan dan pembekalan keterampilan kepada masyarakat telah dilakukan secara efektif. Masyarakat telah diberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan desa wisata, mulai dari pelayanan wisata, manajemen homestay, hingga pemasaran produk lokal. Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat, seperti pelatihan untuk UMKM dan tourguide, telah meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan potensi wisata yang ada.

Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat mampu meningkatkan kualitas layanan dan produk yang mereka tawarkan, serta meningkatkan daya saing desa wisata Alamendah. Desa wisata Alamendah menunjukkan hasil nyata dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kini tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wisata, tetapi juga memiliki otonomi lebih dalam membuat keputusan yang memengaruhi pengelolaan desa wisata. Keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wisata menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas dan kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk mengelola potensi lokal secara efektif, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari keberadaan desa wisata.

REFERENSI

- Antara, M., & Arida, S. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*. *Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana*, 1–43.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (Tim FAM Publishing (ed.)). FAM Publishing.
- Creswell, J. W. (2013a). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Sage.
- Creswell, J. W. (2013b). *RESEARCH DESIGN : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PUSTAKA PELAJAR.
- Dzikriansyah. (2022). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*, 9(1), 1–15.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*.
- Hayat, & Zaini, R. A. N. (2018). *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*. Inteligencia Media.
- Hermansyah, H. (2021). Partisipasi Sosial Dalam Pembangunan Daerah (Sebuah Tinjauan Konsep). *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, IX, 50–58.
<https://doi.org/10.47030/aq.v9i1.68>
- Hilman, Y. A., & Arifin, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata “Bukit Sebrang” Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 36–49.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v6i1.1956>
- Jamanti, R. (2014). Pengaruh Berita Banjir Di Koran Kaltim. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 17–33.
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2022). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>
- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta : Samudra Biru.

- Nabilah, A., & Djuwendah, E. (2022). Potensi dan Strategi Pengembangan Agroekowisata Desa Alamendah Sebagai Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Potential and AgroEcotourism Development Strategy Alamendah Village As a Community-Based Tourism Area. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 9(2), 663–679.
- Nirwani, A., Azizah, N., & Fauzany, R. (2023). Implementasi Kriteria Community-Based Tourism Asean: Studi Kasus Pada Desa Wisata Alamendah. *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, 1(2), 64–70. <https://doi.org/10.59820/telpar.v1i2.147>
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sulistiyani, & Teguh, A. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahyudiyono, W. (2019). Implikasi Penggunaan Internet terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(2), 63. <https://doi.org/10.31504/komunika.v8i2.2487>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). Pedoman Desa Wisata. *Pedoman Desa Wisata KEMENPAREKRAF 2019*, 1–94. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>
- Wisata, J. D. (2024). *Sebaran Desa Wisata di Indonesia*. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/sebaran>